

Implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Desa Wisata : Studi Desa Pelaga Kabupaten Badung

Ni Luh Putu Ening Permini^{1*}, I Kadek Dede Junaedy², I Wayan Andi Prayoga³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai, Denpasar Indonesia; ning.permini@unr.ac.id

* Correspondence : ning.permini@unr.ac.id

ABSTRAK

Desa Pelaga, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, telah ditetapkan sebagai desa wisata. Berdasarkan hasil kajian yang disampaikan pada Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) tahun 2015 di Denpasar, kegiatan pariwisata di Desa Pelaga dianggap sudah berjalan, namun masih terpusat hanya di Banjar/Dusun Kiadan, sementara potensi wisata lainnya belum dikembangkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan desa wisata di Desa Pelaga, Kabupaten Badung dan faktor-faktor apa saja yang dihadapi dalam pengembangan objek wisata di Desa Pelaga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan desa wisata di Desa Pelaga dianalisis berdasarkan sembilan indikator, yaitu: 1) Partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan desa, 2) Ekonomi kreatif masyarakat, 3) Peran sebagai penggerak perekonomian, 4) Tanggung jawab pengurus desa terhadap desa wisata Kiadan, 5) Penekanan pada aspek pelestarian lingkungan, 6) Pelibatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, 7) Pembentukan pengurus untuk menjalankan dan mengembangkan desa wisata, 8) Sosialisasi kepada masyarakat, dan 9) Kejelasan SOP untuk pengurus desa wisata Kiadan.

Kata kunci : *Desa Wisata, Pengembangan, Ekowisata.*

ABSTRACT

Pelaga Village, located in Petang Subdistrict, Badung Regency, has been designated as a tourist village. Based on the study presented at the 2015 National Science and Technology Seminar (Senastek) in Denpasar, tourism activities in Pelaga Village are considered to be operational, but are still centered only in Banjar/Dusun Kiadan, while other tourism potentials remain undeveloped. This study aims to understand the implementation of Badung Regent Regulation Number 47 of 2010 concerning the establishment of tourist villages in Pelaga Village, Badung Regency, and the factors faced in the development of tourist attractions in Pelaga Village. This descriptive research uses a qualitative approach, employing interview, observation, and literature study methods. The implementation of Badung Regent Regulation Number 47 of 2010 concerning the establishment of tourist villages in Pelaga Village is analyzed based on nine indicators: 1) Participation of the village government and community in village development, 2) Community creative economy, 3) Role as an economic driver, 4) Responsibility of the village administrators for the Kiadan tourist village, 5) Emphasis on environmental conservation, 6) Involvement of natural and human resources, 7) Formation of management to run and develop the tourist village, 8) Community socialization, and 9) Clarity of SOP for the Kiadan tourist village administrators..

Keywords: *Tourist Village, Development, Ecotourism.*

Pendahuluan

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki berbagai macam atraksi wisata. Pariwisata pedesaan menurut (Hadiwijoyo, 2012) adalah sebagai suatu pemukiman dengan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati, mengenal dan menghayati kekhasan desa dengan segala daya tariknya dan tuntutan kegiatan hidup bermasyarakat. Desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan dan pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis, pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap untuk menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Desa wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan tradisional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada disuatu desa wisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata menjelaskan desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku (Sugiartawan et al., 2019).

Bali merupakan salah satu provinsi yang banyak memiliki potensi desa wisata. Bisa dilihat dari perkembangan pemanfaatan potensi-potensi desa sebagai upaya menjadi desa wisata. Menurut (Dewi, 2013), desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Selain itu menurut (Zakaria & Dewi, 2014), desa wisata merupakan sebuah wilayah pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Potensi tersebut beragam diantaranya wisata alam, adat istiadat dan seni yang khas. Adat istiadat dan seni ini sangat berkaitan dengan agama Hindu yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat. Selain itu, bagi masyarakat Bali, seni telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Desa Pelaga termasuk wilayah Kecamatan Petang, Kabupaten Badung yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan yang ditunjang oleh sarana prasarana yang ada, cukup mendukung dalam rangka melaksanakan program pembangunan. Desa Pelaga sudah ditetapkan sebagai desa wisata dan berdasarkan hasil kajian yang disampaikan pada saat Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) tahun 2015 di Denpasar kegiatan pariwisata di Desa Pelaga dianggap sudah berjalan, tapi hanya berpusat pada Banjar/Dusun Kiadan saja sedangkan potensi wisata lainnya belum dikembangkan.

Desa Pelaga memiliki panorama alam dengan bentangan wilayah menghijau yang masih asri dan alami serta wilayah pegunungan dengan udaranya yang segar bebas dari polusi asap kendaraan sehingga membuat masyarakatnya hidup tentam, damai dan nyaman sepanjang hari. Desa Pelaga sudah mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun manca Negara sejak dikembangkannya air terjun Nunung sebagai salah satu daya

tarik wisata di Desa Pelaga, khususnya bagi wisatawan yang memiliki kegemaran wisata alam (*ecotourism*). Setiap hari tampak puluhan wisatawan baik domestik maupun mancanegara memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke Desa Pelaga guna menikmati keindahan suasana alamnya yang masih asri.

Sampai saat ini kegiatan ekowisata tersebut belum berjalan secara optimal di Banjar Kiadan Desa Pelaga, mengingat masih lemahnya sumber daya manusia yang berkaitan dengan jiwa kewirausahaan, pemahaman terhadap konsep ekowisata, lemahnya keterampilan dalam mengolah hasil perkebunan menjadi produk wisata yang menarik, serta lemahnya kemampuan SDM dalam mengemas paket ekowisata dan penguasaan bahasa asing khususnya Bahasa Inggris. Dalam bidang pemasaran, juga menemui permasalahan terkait dengan promosi ekowisata yang belum terintegrasi, sehingga produksi perkebunan dan aktifitas ekowisata sulit dipasarkan karena belum tersedianya lembaga pengelola ekowisata profesional dan belum terbangunnya sistem distribusi pemasaran (*marketing distribution*) yang menghubungkan produsen paket ekowisata dengan konsumen/wisatawan). Sehingga pengembangan desa wisata ini belum memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara Gede Wirata (Pemandu Wisata Banjar Kiadan) perkembangan desa wisata di Desa Kiadan dimulai pada Tahun 1999 yakni mulai bekerjasama dengan Yayasan Wisnu dengan membentuk jaringan ekonomi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan bergabung dalam JED, Membentuk jaringan ekowisata desa dalam bidang pariwisata dengan pertanian sebagai daya tarik wisatawan pada tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2006 pengembangan ekowisata desa dan mulai didatangi wisatawan lokal sedangkan wisatawan asing mulai berkunjung pada tahun 2007. Kedatangan wisatawan asing mulai bertambah kurun waktu 2 tahun yakni pada 2009-2011. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tahun 2010 tentang Penetapan Desa Wisata dan Desa Kiadan masuk menjadi salah satu desa wisata ditetapkan pada tahun 2010. Sejalan dengan perkembangannya Desa Wisata sudah tidak berjalan dengan optimal.

Studi tentang implementasi kebijakan terkait pembentukan desa wisata telah memberikan wawasan berharga dalam konteks pengembangan pariwisata di Indonesia. Beberapa penelitian menyoroti aspek penting terkait pelaksanaan kebijakan ini. Misalnya, penelitian oleh Aly et al. (2020) membahas pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan desa wisata, yang melibatkan tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, Marlina (2019) menekankan kemandirian masyarakat desa dalam perspektif pariwisata berbasis masyarakat, menyoroti pentingnya pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor utama pembangunan di Indonesia.

Lebih lanjut, Basri et al. (2022) mengeksplorasi pendampingan masyarakat dalam menganalisis kesiapan promosi pariwisata daerah, sementara Purnamaningrum & Nugroho (2022) menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata tertentu. Dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, Yulianah (2021) menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk pariwisata berbasis masyarakat di daerah pedesaan. Sementara itu, Wahyuni et al. (2023) membahas strategi pemasaran digital untuk situs pariwisata dan budaya di desa, menunjukkan pentingnya memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan destinasi wisata. Dari sejumlah studi masih belum ditemukan kajian mengenai implementasi Peraturan Bupati dalam penetapan desa wisata.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Desa Wisata di Desa Pelaga Kabupaten Badung serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Obyek Wisata di Desa Pelaga. Penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan penetapan desa wisata.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan yang terjadi dimasa yang sekarang ataupun yang akan datang terkait masalah atau fenomena yang diangkat oleh peneliti. Penetapan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun informan pada penelitian ini yaitu Kepala Upt Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Desa Wisata di Desa Pelaga Kabupaten Badung

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Desa Wisata di Desa Pelaga Kabupaten Badung khususnya desa wisata Kiadan maka digunakan 2 (dua) variable besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan meliputi: kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumberdaya yang dilibatkan. Lingkungan implementasi meliputi: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; dan kepatuhan dan daya tangkap (Merilee S. Grindle dalam Subarsono, 2011). Hal-hal tersebut diatas akan dianalisis berdasarkan hasil wawancara peneliti sebagaimana diuraikan lebih lanjut. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah daerah telah mengatasi masalah anak putus sekolah dengan menggunakan berbagai taktik dan solusi praktis. Seperti melakukan pengumpulan dan analisis data, tugas pemerintah daerah adalah mengumpulkan informasi rinci tentang jumlah siswa sekolah menengah yang tidak bersekolah.

A. Isi Kebijakan

1. Kepentingan Kelompok Sasaran

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Desa Wisata di Desa Pelaga Kabupaten Badung dikeluarkan sebagai bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Badung. Banjar Kiadan merupakan salah satu desa wisata yang ditetapkan di Kabupaten Badung berdasarkan Perbup tersebut. Pemerintah desa dan masyarakat sekitar bersama-sama berpartisipasi untuk pengembangan desa. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk

memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008) serta *interest affected* yakni kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

2. Tipe Manfaat

Adanya desa wisata Kiadan seharusnya memberikan dampak yang positif terhadap desa dan masyarakat. Selain mendapatkan penghasilan dari hasil pertanian, masyarakat juga dapat menghasilkan dari berjualan kerajinan, membuka warung, restoran, dan penginapan. Namun karena kurangnya pengembangan untuk desa wisata Kiadan, maka kunjungan wisatawan tidak terlalu banyak (Pitana dalam Nurhajati, 2017). Sehingga kunjungan wisatawan tersebut tidak terlalu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pembangunan dan pengembangan pariwisata secara langsung akan merambah dan mengikutsertakan masyarakat, sehingga dapat memberikan berbagai pengaruh kepada masyarakat setempat, baik berupa pengaruh positif maupun negatif. Pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar desa wisata yang diorganisir secara maksimal, akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hasil yang diperoleh dari kegiatan desa wisata akan dikembalikan kepada masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Pengembangan desa wisata Kiadan adalah sebagai penggerak perekonomian masyarakat dengan pengembangan pariwisata kerakyatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun hal tersebut belum dapat berjalan dengan optimal karena belum ada perubahan yang terjadi dari adanya desa wisata terhadap perekonomian masyarakat sekitar maupun penataan lingkungannya. Penataan kembali bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengenalan budaya yang ada (Eisner dan Simon, 1993). Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Setelah dikeluarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Desa Wisata maka ditetapkan pengurus desa wisata Kiadan. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan desa wisata Kiadan akan langsung diserahkan kepada pengurus desa wisata Kiadan. Suatu organisasi disusun tidak hanya mengatur orang-orangnya saja, tetapi juga membentuk dan menyusun serta mengorganisasikan tugas masing-masing fungsi setiap anggota organisasi. Untuk itu perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama-sama (Muis, 2004).

5. Pelaksanaan Program

Pengembangan pariwisata yang dilakukan di Banjar Kiadan lebih menekankan pada aspek pelestarian lingkungan. Masyarakat masih menjaga keaslian dari lingkungan alam dan kehidupan masyarakat setempat yang menonjolkan keaslian kehidupan masyarakat Banjar Kiadan. Pemanfaatan lahan perkebunan sebagai destinasi pariwisata dipergunakan untuk *cycling*. Pelestarian lingkungan dalam arti pengelolaan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan bagi kehidupan manusia, sebab lingkungan memiliki nilai-nilai yang konstruktif bagi kehidupan dan seputar lingkungan itu sendiri. Pelestarian lingkungan

dalam arti yang sangat luas memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan dan kemakmuran hidup manusia (Hikmah, 2019).

6. Sumberdaya yang Dilibatkan

Sumber daya yang ada masih belum ditunjang oleh sumber daya manusia yang profesional untuk promosi maupun dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata Kiadan. Sehingga kunjungan wisatawan ke desa wisata Kiadan masih sedikit. Menurut (Nurhajati, 2017) kegiatan promosi merupakan suatu kegiatan yang intensif dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kegiatan promosi itu diadakan usaha untuk memperbesar daya tarik produk wisata terhadap calon konsumen.

B. Lingkungan Implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Desa wisata terbentuk atas keluarnya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Badung. Dari peraturan tersebut maka disosialisasikan ke masyarakat tentang terpilihnya Banjar Kiadan menjadi desa wisata Kiadan. Dibentuklah suatu pengurus yang bertugas untuk menjalankan dan mengembangkan desa wisata dibantu oleh masyarakat sekitar. Ketika potensi wisata ada di daerah pedesaan, maka potensi tersebut harus dikelola oleh masyarakat yang mendiami desa setempat (Rocharungsat, 2008). Karakteristik Lembaga dan Penguasa (Institution and Regime Characteristic). Pemerintah mensosialisasikan tentang terpilihnya desa wisata Kiadan terhadap masyarakat. Sehingga dari sosialisasi tersebut dibentuklah suatu pengurus dalam menjalankan dan mengembangkan desa wisata Kiadan. Namun pengembangan desa wisata tersebut hanya berjalan lancar diawal saja, karena sampai saat ini desa wisata Kiadan sudah tidak berjalan dengan optimal. Kontribusi baru untuk keberlanjutan pariwisata menggabungkan perspektif pemangku kepentingan melalui pendekatan jaringan (Lee dan Hsieh, 2016, p.779).

2. Kepatuhan dan Daya Tangkap

SOP terhadap pengurus desa wisata Kiadan tidak terlalu jelas. Sehingga pihak pengurus hanya menunggu perintah dari desa dalam menjalankan desa wisata. Masyarakat juga tidak tahu apa yang harus dilakukan jika tidak diberikan arahan dalam mengembangkan desa wisata. Menurut (Gabriele, 2018, p.2) menyatakan dengan adanya SOP akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, perusahaan memberikan suatu rancangan berupa SOP yang akan menjadi pedoman karyawan dalam melakukan tugasnya dan untuk meminimalisasi kesalahan saat melakukan tugas masing-masing karyawan. Hal tersebut didukung oleh Grindle (dalam Subarsono, 2011) yang menjelaskan bahwa sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

2. Faktor-Faktor yang dihadapi dalam Pengembangan Obyek Wisata di Desa Pelaga

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dalam pengembangan obyek wisata di Desa Pelaga khususnya desa wisata Kiadan masih terdapat beberapa faktor yang dihadapi. Faktor yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata Kiadan berdasarkan indikator menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) yaitu:

1. Faktor pada tipe manfaat

Pengembangan desa wisata Kiadan belum memberikan manfaat pada masyarakat sekitar, khususnya pada bidang perekonomian yang berbasis pariwisata. Sampai saat ini

masyarakat Banjar Kiadan masih fokus terhadap perkebunan mereka. Ekonomi pariwisata akan menjadi lebih efektif pengembangannya apabila masyarakat turut aktif berperan dalam pariwisata. Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi yang paling tepat untuk membangun ekonomi pariwisata dan dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat. Kondisi tersebut akan memberikan dampak pengembangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pariwisata yang berkelanjutan berbasis masyarakat dalam jangka panjang dapat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan ekonomi negara, tidak terbatas pada ekonomi pariwisata (Hasan, 2018).

2. Faktor pada derajat perubahan yang diinginkan

Desa wisata Kiadan belum berjalan dengan optimal karena belum banyak perubahan yang terjadi baik dalam perekonomian maupun penataan lingkungan untuk destinasi pariwisata. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai andalan pembangunan di masa depan (Sulistiyanto, 2013).

3. Faktor pada sumber daya yang dilibatkan

Masih lemahnya sumber daya manusia di sekitar lokasi desa wisata Kiadan. Seperti kurangnya promosi tentang desa wisata Kiadan pada sosial media sehingga masih tidak dikenal oleh wisatawan. Untuk memperkenalkan produk pariwisata memerlukan promosi untuk memperkenalkan objek wisata ke seluruh dunia juga di Indonesia, tanpa promosi yang efektif maka objek wisata tidak dapat dikenal, sehingga tingkat kunjungan wisatawan pasti rendah (Wolah, 2016). Masyarakat juga tidak banyak yang bisa berbahasa Inggris sehingga menjadi susah berkomunikasi dengan wisatawan asing yang berkunjung. Dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik diharapkan pelaku wisata dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan asing (Astina, 2017).

4. Faktor pada kepatuhan dan daya tangkap

SOP terhadap pengurus desa wisata Kiadan masih kurang jelas. Sehingga pengurus hanya menunggu perintah dari desa saja. (Gabriele, 2018) menjelaskan bahwa dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu perusahaan dapat terancang dengan baik dan dapat berjalan sesuai kemauan perusahaan. SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya SOP akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang penetapan Desa Wisata di Desa Pelaga, khususnya di Banjar Kiadan, menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat partisipasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata serta adanya potensi alam yang mendukung, beberapa kendala utama masih menghambat perkembangan optimal desa wisata tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata belum sepenuhnya optimal, dan keterlibatan aktif dari masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan pariwisata. Pengembangan desa wisata Kiadan belum memberikan

dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar, dengan banyak masyarakat yang masih lebih fokus pada kegiatan perkebunan dibandingkan dengan kegiatan pariwisata.

Meskipun ada keinginan untuk menjadikan desa wisata sebagai penggerak ekonomi lokal, perubahan yang terjadi masih belum signifikan. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang pariwisata menjadi hambatan utama, dan pelatihan serta peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal, terutama dalam bidang kewirausahaan dan bahasa asing, sangat diperlukan. Promosi desa wisata Kiadan belum dilakukan secara efektif, sehingga desa ini belum dikenal luas oleh wisatawan.

Karakteristik kelembagaan dan kekuasaan yang ada belum mendukung sepenuhnya pengembangan desa wisata, dan struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas yang efektif diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengelola desa wisata masih kurang jelas, menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Untuk mencapai pengembangan desa wisata yang optimal, perlu adanya pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta promosi yang lebih efektif harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, Desa Pelaga, khususnya Banjar Kiadan, dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Referensi

- Aly, M., Suharto, B., Nurhidayati, S., Nuruddin, N., & Triwastuti, R. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan desa wisata di desa bejijong kabupaten mojokerto. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 4(2), 390. <https://doi.org/10.20473/jlm.v4i2.2020.390-399>
- Ariesta, I Putu Agus Suarsana dan I G A Bagus Widiantara. (2020). Identifikasi Aspek Hukum Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus di Kabupaten Badung Bali). *Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia*, Vol 4, No 1, 27-32. Dikutip dari http://mapindo.ejurnal.info/index.php/manajemen_pelayanan_hotel/article/view/68.
- Basri, B., Assidiq, M., Sahabuddin, C., & Yunus, M. (2022). Pendampingan komunitas sahabat penyus dalam analisis kesiapan promosi wisata daerah dengan pendekatan 4a. *Sipissangngi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 224. <https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i3.3647>
- Dewi, Made Heny Urmila. (2013). Pengembangan Desa Wisata BerbasisPartisipasi Masyarakat Lokal Di Jatiluwih Tabanan Bali. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 130.
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasan, Ali. (2018). Model Pengembangan Ekonomi Pariwisata. *Jurnal Media Wisata*, Vol. 16, No. 1, 639-650.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lee, T.H. dan Hsieh, H.-P. (2016). Indicators of sustainable tourism: a case study fromTaiwan's wetland, *Ecological Indicators*, Vol. 67,779-787.

- Marlina, N. (2019). Kemandirian masyarakat desa wisata dalam perspektif community based tourism: studi kasus desa ketengger, kabupaten banyumas. *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i1.4735>
- Nugroho, T. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata pantai krakal di kabupaten gunungkidul. *Thejournalish Social and Government*, 3(1), 35-42. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i1.225>
- Permini, Ni Luh Putu Ening. (2022). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Menuju *Smart Village Destination* di Desa Selumbung Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*. Dikutip dari <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1182>.
- Wahyuni, L., Lasmawan, I., & Suastika, I. (2023). Strategi digital marketing tempat pariwisata dan budaya desa cempaga melalui platform digital. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 343-349. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53530>
- Yulianah, Y. (2021). Mengembangkan sumber daya manusia untuk pariwisata berbasis komunitas di pedesaan. *Komitmen Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.15575/jim.v2i1.12472>